



Dp3ap2kb  
Kab. Tanah Laut

**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa

# PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH LAUT**



<https://dp2kbp3a.tanahlautkab.go.id>



dp3ap2kbtanahlaut



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
  23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
  24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
  25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan.A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : [dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com](mailto:dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**NOMOR: 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) DP3AP2KB Tahun 2025, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, maka

perlu menetapkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);

21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Tim Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 19 Mei 2025

**KEPALA DINAS,**



**MARIA ULFAH, S.PSI., M.M**  
**Pembina Tk.I(IV/b)**  
**NIP. 19791113 200501 2 008**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
KAB TANAH LAUT  
NOMOR : 19 TAHUN 2025  
TANGGAL : 19 Mei 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas
- II Ketua : Sekretaris
- III Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  4. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  7. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan Dan Informasi Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
  8. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan

Informasi

9. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator  
Analisa Data, Pelaporan dan Statistik  
Program Bidang Pengendalian  
Penduduk, Data dan Informasi
10. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator  
Perlindungan Hak Perempuan dan  
Perlindungan Anak Bidang  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak
11. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator  
Pemberdayaan Perempuan Bidang  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak
12. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator  
Keluarga Berencana dan Kesehatan  
Reproduksi Bidang Keluarga Berencana  
dan Keluarga Sejahtera
13. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator  
Ketahanan Keluarga Bidang Keluarga  
Berencana dan Keluarga Sejahtera
14. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator  
Pemberdayaan Keluarga Bidang  
Keluarga Berencana dan Keluarga  
Sejahtera

**KEPALA DINAS,**



**MARIA ULFAH, S.Psi., M.M**  
**Pembina Tk.I(IV/b)**  
**NIP. 19791113 200501 2 008**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan bentuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses penyusunan rancangan perubahan Renja DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana tercantum perubahan rencana strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Rancangan Renja Perubahan DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bapperida, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut berdasarkan usulan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, penyelarasan program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut berdasarkan kepada ketersediaan dana Pemerintah Daerah. Renja Perubahan DP3AP2KB Kabupaten

Tanah Laut ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bapperida. Kemudian Renja Perubahan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
22. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1 /0664/KUM/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud :**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan :**

- a) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

- b) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD P3AP2KB adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

##### **BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

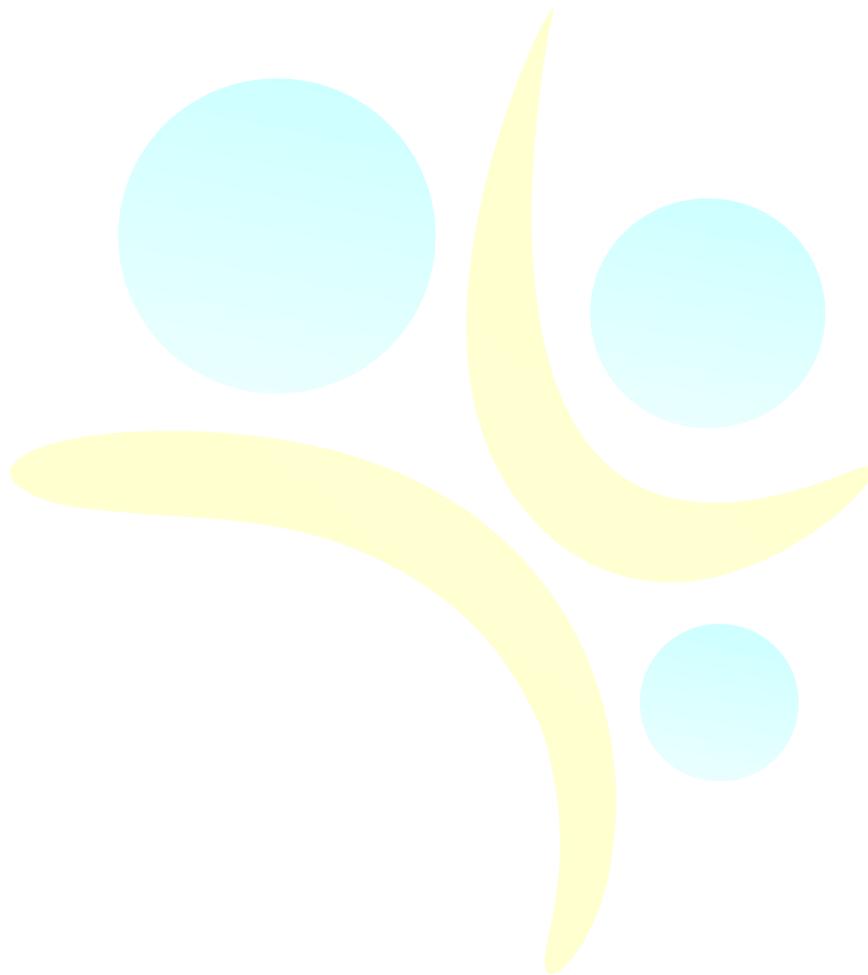
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya.

##### **BAB III. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja SKPD**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

## **BAB IV. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**  
**TAHUN 2025**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Triwulan I dan Capaian Renstra**

Hasil kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 2025 yaitu :

**REALISASI ANGGARAN DP3AP2KB PER 31 MARET 2025**

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE KEUANGAN (%)
I	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>488.228.666,66</b>	<b>74.578.260,00</b>	<b>15,28</b>
1	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>90.417.689,40</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	53.029.616,00	-	0,00
1.2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.388.073,40	-	0,00
2	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>397.810.977,26</b>	<b>74.578.260,00</b>	<b>18,75</b>
2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	397.810.977,26	74.578.260	18,75
II	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>202.738.787,76</b>	<b>6.765.000,00</b>	<b>3,34</b>
1	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.700.917,76</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.942.897,76	-	0,00
1.2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.758.020,00	-	0,00

2	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>142.037.870,00</b>	<b>6.765.000,00</b>	<b>4,76</b>
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	142.037.870,00	6.765.000	4,76
III	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,82</b>
1	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,82</b>
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.846.599,00	1.260.000	0,82
IV	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>706.393.095,00</b>	<b>43.235.660,00</b>	<b>6,12</b>
1	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>395.359.154,00</b>	<b>29.648.660,00</b>	<b>7,50</b>
1.1	Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	395.359.154,00	29.648.660	7,50
2	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>311.033.941,00</b>	<b>13.587.000,00</b>	<b>4,37</b>
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	311.033.941,00	13.587.000	4,37
V	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.688.286.450,49</b>	<b>1.294.201.985,00</b>	<b>19,35</b>
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.999.004,36</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>6,86</b>
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.702,00	2.400.000	8,00
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.302,36	-	0,00
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.221.578.566,98</b>	<b>1.073.959.009,00</b>	<b>20,57</b>
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.216.578.774,00	1.073.959.009	20,59
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.792,98	-	0,00

3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>72.920.500,00</b>	-	<b>0,00</b>
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.920.500,00	-	0,00
3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.000.000,00	-	0,00
4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>391.088.495,15</b>	<b>71.081.000,00</b>	<b>18,18</b>
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.917.212,00	-	0,00
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.767.653,50	40.707.000	18,95
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.270.597,00	-	0,00
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.260.587,25	680.000	5,13
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	31.409.422,00	-	0,00
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.466.000,00	29.694.000	26,17
4.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.997.023,40	-	0,00
5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>125.661.412,00</b>	-	<b>0,00</b>
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	15.501.416,00	-	0,00
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.640.000,00	-	0,00
5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.519.996,00	-	0,00
6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>536.288.472,00</b>	<b>111.124.976,00</b>	<b>20,72</b>
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.000.000,00	24.990.104	14,36
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.288.472,00	86.134.872	23,78
7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>305.750.000,00</b>	<b>35.637.000,00</b>	<b>11,66</b>
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000,00	5.875.000	15,67
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.000.000,00	27.312.000	12,30

7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.250.000,00	2.450.000	11,53
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	-	0,00
VI	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>167.085.043,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>12.426.283,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1.1	Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	12.426.283,00	-	0,00
2	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>154.658.760,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
2.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	52.430.000,00	-	0,00
2.2	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	37.395.000,00	-	0,00
2.3	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	64.833.760,50	-	0,00
VII	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>3.268.274.216,54</b>	<b>225.764.302,00</b>	<b>6,91</b>
1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>324.566.175,55</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	49.100.000,00	-	0,00
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	44.770.000,00	-	0,00
1.3	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	203.306.175,55	-	0,00
1.4	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27.390.000,00	-	0,00
2	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.352.015.420,00</b>	<b>75.356.352,00</b>	<b>5,57</b>
2.1	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.352.015.420,00	75.356.352	5,57

3	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>868.188.260,99</b>	<b>150.407.950,00</b>	<b>17,32</b>
3.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.200.946,92	2.940.000	5,86
3.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	331.422.247,20	125.077.950	37,74
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	367.312.248,00	3.900.000	1,06
3.4	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.573.990,26	2.250.000	21,28
3.5	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	108.678.828,61	16.240.000	14,94
4	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>723.504.360,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
4.1	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	723.504.360,00	-	0,00
VIII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>951.611.889,41</b>	<b>34.632.660,00</b>	<b>3,64</b>
1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>951.611.889,41</b>	<b>34.632.660,00</b>	<b>3,64</b>
1.1	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	142.614.538,80	15.273.500	10,71
1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	394.355.500,00	-	0,00
1.3	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	77.527.255,79	19.359.160	24,97

1.4	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	174.544.870,82	-	0,00
1.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	162.569.724,00	-	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>12.625.464.748,36</b>	<b>1.680.437.867,00</b>	<b>13,31</b>

Pelaihari, 31 Maret 2025  
Mengetahui  
Kepala Dinas P3AP2KB

Kabupaten Tanah Laut,



**MARTA ULFAH, S.Psi, M.M.**  
NIP. 19791113 200501 2 008

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja DP3AP2KB sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sampai dengan dapat diuraikan sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d TW I Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			<b>85 Nilai</b>				
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>			<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8	6 Dokumen	-	0		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	6 Laporan	-	0		
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		-	<b>100 Persen</b>				

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30	30 Orang/bulan	3	25		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5	5 Dokumen	-	0		
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		-	<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2	29 Paket	-	0		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	7 Orang	-	0		
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		-	<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9	1 Paket	-	0		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9	9 Paket	1	11,11		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1 Paket	-	0		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	3 Paket	1	33,33		
Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Bahan/Material yang		1	3 Paket	-	0		

Bahan/Material	Disediakan							
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	12 Laporan	3	25		
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	12 Dokumen	3	25		
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		12	<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	4 Unit	-	0		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	1 Unit	-	0		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6	1 Unit	-	0		
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		2	<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 Laporan	3	25		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	12 Laporan	3	25		

<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-	100 Persen				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3	1 Unit	1	100		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5	15 Unit	7	46,67		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12	51 Unit	5	9,80		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	-	0		
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pembinaan Perempuan</b>		1	100 Persen				
<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG</b>		5	100 Persen				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)		21	1 Dokumen	-	0		

	Kewenangan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		2	50 Orang	-	0		
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Pembinaan pada Kelompok Industri Rumahan</b>		1	25 Kelompok				
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			980 Orang	225	24,46		
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan</b>			0,005 Rasio				
<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>			90 Persen				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	6 Dokumen	-	0		

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	45 Perangkat Daerah	-	0		
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		1	100 Persen				
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		43	16 Orang	5	31,25		
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan</b>		-	75 Persen				
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD</b>		3 Kecamatan	3 Kecamatan				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	-	0		

Daerah Kabupaten/Kota								
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanjuti</b>			<b>100 Persen</b>				
<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		-	<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu		-	32 Kegiatan	5	15,63		
<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		8	<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		25	50 Orang	8	16		

<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Total Fertility Rate</b>		-	<b>2,07 Anak</b>				
<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut</b>		18	<b>4 Sekolah</b>				
Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan			4 Kegiatan	-	0		
<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa</b>			<b>26,67 Persen</b>				
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		-	11 Laporan	-	0		
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Keluarga			-		-	0		

Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		2	1 Dokumen	-	0		
Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk			10 Unit	-	0		
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)</b>			<b>77.20 Persen</b>				
<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>		-	<b>8,40 Persen</b>				
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		-	2 Laporan	-	0		
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			5		-	0		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi		-	10 Laporan	-	0		

dan Mini Lokakarya (Minilok)	Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		43	1 Dokumen	-	0			
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				-	0			
Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			202 Organisasi	-	0			
<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan</b>			<b>100 Persen</b>					
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		-	556 Orang	556	30			
<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pelayanan KB</b>		-	<b>75,90 Persen</b>					

Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		2	12 Laporan	2	16,67		
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		-	850 Orang	300	35,29		
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		11	45 Unit	1	2,22		
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		10	23 Laporan	2	8,70		
Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		12	170 Orang	-	0		
<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		6	<b>100 Persen</b>				
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung			1 Dokumen	-	0		

	KB							
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				-	<b>73.96 Persen</b>		
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk</b>				-	<b>256 Kelompok</b>		
Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				2	-	0	
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				10	1 Laporan	-	0
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia				10	47 Unit	-	0

<p>Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p>	<p>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p>		<p>1</p>	<p>220 Orang</p>	<p>44</p>	<p>20</p>		
<p>Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</p>		<p>1</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>-</p>	<p>0</p>		
<p>Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p>	<p>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</p>		<p>202</p>	<p>120 Orang</p>	<p>-</p>	<p>0</p>		
<p><b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b></p>			<p>-</p>					

<p>Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>	<p>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>		<p>556</p>					
<p>Sub Kegiatan endampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>	<p>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</p>		<p>-</p>					

Berdasarkan hasil capaian kinerja dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat catatan penting antara lain :

1. Beberapa Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan .
2. Program/Kegiatan yang tidak tercapai disebabkan oleh :
  - Kegiatan di jadwalkan pada triwulan 2 dan 3
  - Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan anggaran kas

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat isu-isu penting antara lain :

1. Belum Optimal Kesejahteraan Keluarga
2. Belum Optimalnya Berdayanya Kelompok Rumah Tangga Perempuan
3. Belum Optimalnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1** Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu : (1). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### **3.1.1** Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangsa Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia. Selain itu, BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas

Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.<sup>2</sup>
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan

Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

### 3.1.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
2. **Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO**, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi,

pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

3. **Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya**, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan

keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Tujuan
  - a. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
  - b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Indikator Tujuan
  - a. Indeks Pembangunan Gender
  - b. Nilai SAKIP Kabupaten
3. Sasaran Strategis
  - a. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
  - b. Berdayanya Kelompok Rumah Tangga Perempuan
  - c. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel
4. Indikator Sasaran Strategis
  - a. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
  - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
  - c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari Dana APBD terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - ii. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
    - ii. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga
    - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - v. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material

- vi. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vii. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - ii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - iii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik
  - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengendalian Penduduk
  - a. Kegiatan Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
    - i. Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidik Formal

- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
  - ii. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga
  - iii. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
  - iv. Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
  
- 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - i. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
    - ii. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
    - iii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi
    - iv. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
    - v. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - vi. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
    - vii. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
  - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
    - i. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - ii. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - iv. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - v. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - i. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
  - ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - i. Sub Kegiatan Promosidan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
    - ii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
    - iii. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL,

- PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- iv. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
  - v. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
    - ii. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Perempuan
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - ii. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pemenuhan Hak Anak

- a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA
- b. Kegiatan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Sub Kegiatan Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **4.2 Rencana Program dan Kegiatan yang dilakukan Perubahan**

Beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 mengalami pergeseran atau perubahan. Pergeseran atau Perubahan dapat dilihat pada Tabel Berikut :

## Rekapitulasi Rancangan Perubahan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN RASIONALISASI EFESIENSI	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	RENCANA PERGESERAN/ PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>85 Nilai</b>	<b>85 Nilai</b>	<b>6.800.101.271,80</b>	<b>6.688.286.450,49</b>	<b>6.909.014.260,49</b>	<b>7.335.979.144,67</b>	<b>426.964.884,18</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>34.999.458,00</b>	<b>34.999.004,36</b>	<b>34.999.004,36</b>	<b>34.999.004,36</b>	<b>-</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	29.999.702,00	29.999.702	29.999.702	29.999.702	-
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	4.999.756,00	4.999.302,36	4.999.302,36	4.999.302,36	-
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>5.221.578.567,00</b>	<b>5.221.578.566,98</b>	<b>5.442.306.376,98</b>	<b>5.442.306.376,98</b>	<b>-</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	5.216.578.774,00	5.216.578.774	5.437.306.584	5.437.306.584,00	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	4.999.793,00	4.999.792,98	4.999.792,98	4.999.792,98	-
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>73.586.500,00</b>	<b>72.920.500,00</b>	<b>72.920.500,00</b>	<b>70.402.000,00</b>	<b>- 2.518.500,00</b>

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	74 Paket	24.586.500,00	23.920.500	23.920.500	42.402.000,00	18.481.500
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	49.000.000,00	49.000.000	49.000.000	28.000.000	- 21.000.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>502.236.862,80</b>	<b>391.088.495,15</b>	<b>391.088.495,15</b>	<b>530.105.043,89</b>	<b>139.016.548,74</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.917.212,00	3.917.212	3.917.212	3.917.212	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	229.284.019,80	214.767.653,50	214.767.653,50	257.282.134,24	42.514.481
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.270.597,00	9.270.597	9.270.597	9.270.597	-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.260.588,00	13.260.587,25	13.260.587,25	13.260.587,25	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	31.409.422,00	31.409.422	31.409.422	34.411.490,00	3.002.068
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	210.098.000,00	113.466.000	113.466.000	206.966.000,00	93.500.000
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	4.997.024,00	4.997.023,40	4.997.023,40	4.997.023,40	-
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>125.661.412,00</b>	<b>125.661.412,00</b>	<b>125.661.412,00</b>	<b>360.628.247,44</b>	<b>234.966.835,44</b>

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	15.501.416,00	15.501.416	15.501.416	15.501.416	-
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	26.640.000,00	26.640.000	26.640.000	26.640.000	-
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	83.519.996,00	83.519.996	83.519.996	318.486.831	234.966.835
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>536.288.472,00</b>	<b>536.288.472,00</b>	<b>536.288.472,00</b>	<b>591.788.472,00</b>	<b>55.500.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	174.000.000,00	174.000.000	174.000.000	229.500.000,00	55.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	362.288.472,00	362.288.472	362.288.472	362.288.472	-
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>305.750.000,00</b>	<b>305.750.000,00</b>	<b>305.750.000,00</b>	<b>305.750.000,00</b>	<b>-</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000	37.500.000	37.500.000	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	222.000.000,00	222.000.000	222.000.000	222.000.000	-

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit	21.250.000,00	21.250.000	21.250.000	21.250.000	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
<b>PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pembinaan Perempuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>583.575.724,26</b>	<b>488.228.666,66</b>	<b>488.228.666,66</b>	<b>1.171.854.532,57</b>	<b>683.625.865,91</b>
<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>95.847.689,40</b>	<b>90.417.689,40</b>	<b>90.417.689,40</b>	<b>90.417.689,40</b>	<b>-</b>
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	56.959.616,00	53.029.616	53.029.616	53.029.616,00	-
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	50 Orang	38.888.073,40	37.388.073,40	37.388.073,40	37.388.073,40	-
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Pembinaan pada Kelompok Industri Rumahan</b>	<b>25 Kelompok</b>	<b>25 Kelompok</b>	<b>487.728.034,86</b>	<b>397.810.977,26</b>	<b>397.810.977,26</b>	<b>1.081.436.843,17</b>	<b>683.625.865,91</b>
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	980 Orang	3464 Orang	487.728.034,86	397.810.977,26	397.810.977,26	1.081.436.843,17	683.625.865,91
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	<b>0,005 Rasio</b>	<b>0,005 Rasio</b>	<b>245.085.282,00</b>	<b>202.738.787,76</b>	<b>202.738.787,76</b>	<b>202.738.787,76</b>	<b>-</b>

<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>98.727.412,00</b>	<b>60.700.917,76</b>	<b>60.700.917,76</b>	<b>60.700.917,76</b>	<b>-</b>
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	87.811.986,00	53.942.897,76	53.942.897,76	53.942.897,76	-
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	10.915.426,00	6.758.020	6.758.020	6.758.020	-
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>146.357.870,00</b>	<b>142.037.870,00</b>	<b>142.037.870,00</b>	<b>142.037.870,00</b>	<b>-</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	16 Orang	16 Orang	146.357.870,00	142.037.870	142.037.870	142.037.870	-
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan</b>	<b>75 Persen</b>	<b>50 Persen</b>	<b>175.746.599,00</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>-</b>
<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD</b>	<b>3 Kecamatan</b>	<b>3 Kecamatan</b>	<b>175.746.599,00</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>152.846.599,00</b>	<b>-</b>

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	175.746.599,00	152.846.599	152.846.599	152.846.599	-
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanju</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>862.791.949,00</b>	<b>706.393.095,00</b>	<b>706.393.095,00</b>	<b>605.799.625,00</b>	<b>- 100.593.470,00</b>
<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>550.408.008,00</b>	<b>395.359.154,00</b>	<b>395.359.154,00</b>	<b>393.741.604,00</b>	<b>- 1.617.550,00</b>
Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	32 Kegiatan	34 Kegiatan	550.408.008,00	395.359.154	395.359.154	393.741.604,00	- 1.617.550
<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>312.383.941,00</b>	<b>311.033.941,00</b>	<b>311.033.941,00</b>	<b>212.058.021,00</b>	<b>- 98.975.920,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50 Orang	312.383.941,00	311.033.941	311.033.941	212.058.021,00	- 98.975.920
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Total Fertility Rate</b>	<b>2,07 Anak</b>	<b>2,07 Anak</b>	<b>219.981.011,25</b>	<b>167.085.043,50</b>	<b>408.885.043,50</b>	<b>360.885.043,50</b>	<b>- 48.000.000,00</b>

<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut</b>	<b>4 Sekolah</b>	<b>4 Sekolah</b>	<b>19.966.077,00</b>	<b>12.426.283,00</b>	<b>12.426.283,00</b>	<b>12.426.283,00</b>	<b>-</b>
Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	19.966.077,00	12.426.283	12.426.283	12.426.283	-
<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa</b>	<b>26,67 Persen</b>	<b>26,67 Persen</b>	<b>200.014.934,25</b>	<b>154.658.760,50</b>	<b>396.458.760,50</b>	<b>348.458.760,50</b>	<b>- 48.000.000,00</b>
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan	11 Laporan	57.962.648,91	52.430.000	52.430.000	4.430.000,00	- 48.000.000
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Keluarga						109.800.000	109.800.000	
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	72.318.230,34	37.395.000	169.395.000	169.395.000	-
Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	10 Unit	10 Unit	69.734.055,00	64.833.760,50	64.833.760,50	64.833.760,50	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)</b>	<b>77.20 Persen</b>	<b>77.20 Persen</b>	<b>4.037.358.586,26</b>	<b>3.268.274.216,54</b>	<b>5.267.232.949,65</b>	<b>5.379.565.407,00</b>	<b>112.332.457,35</b>

<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>	<b>8,40 Persen</b>	<b>8,40 Persen</b>	<b>385.529.888,29</b>	<b>324.566.175,55</b>	<b>1.085.684.908,66</b>	<b>869.429.908,66</b>	<b>- 216.255.000,00</b>
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	71.350.000,00	49.100.000	49.100.000	33.100.000	- 16.000.000
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana						176.550.000	176.550.000	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	10 Laporan	59.399.672,13	44.770.000	259.270.000	214.500.000	- 44.770.000
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	214.280.216,16	203.306.175,55	299.436.209,30	171.341.209,30	- 128.095.000
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		1 Dokumen	-		59.938.699,36	59.938.699,36	-

Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	202 Organisasi	202 Organisasi	40.500.000,00	27.390.000	241.390.000	214.000.000	- 27.390.000
<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.199.435.000,00</b>	<b>1.352.015.420,00</b>	<b>2.229.515.420,00</b>	<b>2.903.015.420,00</b>	<b>673.500.000,00</b>
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	556 Orang	556 Orang	2.199.435.000,00	1.352.015.420	2.229.515.420	2.903.015.420,00	673.500.000
<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pelayanan KB</b>	<b>75,90 Persen</b>	<b>75,90 Persen</b>	<b>1.013.643.881,99</b>	<b>868.188.260,99</b>	<b>1.106.688.260,99</b>	<b>1.186.745.718,34</b>	<b>80.057.457,35</b>
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	65.850.946,92	50.200.946,92	50.200.946,92	55.568.355,55	5.367.408,63
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	850 Orang	850 Orang	377.972.247,20	331.422.247,20	556.422.247,20	602.566.920,92	46.144.674
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	45 Unit	45 Unit	367.312.248,00	367.312.248	367.312.248	446.857.623,00	79.545.375,00

Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Laporan	23 Laporan	28.017.190,26	10.573.990,26	24.073.990,26	24.073.990,26	-
Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	170 Orang	170 Orang	174.491.249,61	108.678.828,61	108.678.828,61	57.678.828,61	- 51.000.000,00
<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>438.749.815,98</b>	<b>723.504.360,00</b>	<b>845.344.360,00</b>	<b>420.374.360,00</b>	<b>- 424.970.000,00</b>
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	438.749.815,98	723.504.360	723.504.360	298.534.360,00	- 424.970.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		20 Kampung			121.840.000	121.840.000,00	-
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>73.96 Persen</b>	<b>73.96 Persen</b>	<b>1.051.541.578,08</b>	<b>951.611.889,41</b>	<b>2.949.411.881,51</b>	<b>2.744.520.580,90</b>	<b>- 204.891.300,61</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk</b>	<b>256 Kelompok</b>	<b>256 Kelompok</b>	<b>1.051.541.578,08</b>	<b>951.611.889,41</b>	<b>1.187.211.881,51</b>	<b>982.320.580,90</b>	<b>- 204.891.300,61</b>

Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	umlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		10 Laporan / Dokumen			105.600.000,00	105.600.000,00	-
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	177.086.476,70	142.614.538,80	142.614.538,80	123.614.244,27	- 19.000.294,53
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	47 Unit	47 Unit	394.355.500,00	394.355.500,00	524.355.492,10	330.762.792,10	- 193.592.700,00
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	220 Orang	220 Orang	110.413.865,56	77.527.255,79	77.527.255,79	85.228.949,71	7.701.693,92
Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	1 Laporan	203.333.341,82	174.544.870,82	174.544.870,82	174.544.870,82	-

Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	120 Orang	120 Orang	166.352.394,00	162.569.724	162.569.724	162.569.724,00	-
<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				-		<b>1.762.200.000,00</b>	<b>1.762.200.000,00</b>	-
Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		8 laporan	-		801.000.000,00	801.000.000,00	-
Sub Kegiatan endampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		8 laporan	-		961.200.000,00	961.200.000,00	-
				<b>13.976.182.001,65</b>	<b>12.625.464.748,36</b>	<b>17.084.751.283,57</b>	<b>17.954.189.720,40</b>	<b>869.438.436,83</b>

Renja DP3AP2KB Tahun 2025 mengalami beberapa kali pergeseran yaitu diantara adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran pertama hanya melakukan pergeseran di dalam subkegiatan itu sendiri tanpa mengurangi/menambah pagu anggaran
2. Pergeseran kedua adalah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Nomor:900.1.12.2/610/BPKAD/2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025 yaitu mengurangi efisiensi pergeseran rasionalisasi efisiensi yaitu melakukan efisiensi pada perjalanan dinas paling sedikit sebesar 50%; dan mengurangi total dari sisa pagu belanja SKPD setelah dikurangi belanja perjalanan dinas paling sedikit sebesar 3% diluar Rekening Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja tidak Terduga dan Belanja Transfer, sehingga Pagu Anggaran DP3AP2KB sebesar Rp. 13.976.182.001,65 menjadi Rp.12.625.464.748,36.
3. Pergeseran ketiga penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK serta sebesar Rp. 220.727.810,00, Serta penambahan Pagu Anggaran untuk Dana DAK Non Fisik (BOKB) sebesar Rp. 4.238.5558.725, sehingga Pagu Anggaran DP3AP2KB sebesar Rp. 12.625.464.748,36 menjadi Rp. 17.084.751.283,57.

Adapun usulan penambahan pada anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 869.438.436,83.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 mengalami pergeseran atau perubahan dapat diuraikan sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 23.920.500,00  
Setelah perubahan menjadi Rp. 42.402.000,00  
Alasan perubahan : Penambahan untuk pembelian pakaian sasirangan dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
    - ii. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 49.000.000,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 28.000.000,00

Alasan perubahan : Pengurangan jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat semula 7 orang menjadi 4 orang

b. Kegiatan Admisitrasi Umum Perangkat Daerah

i. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 214.767.653,50

Setelah perubahan menjadi Rp. 257.282.134,24

Alasan perubahan : penambahan untuk pembelian Laptop dan printer UPTD PPA, pembelian Komputer PC untuk secretariat DP3AP2KB

ii. Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 31.409.422,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 34.411.490,00

Alasan perubahan : penambahan untuk dukungan Porprov

iii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 113.466,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 206.966.000,00

Alasan perubahan : Penambahan anggaran untuk makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 83.519.996,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 318.486.831,00

Alasan perubahan : penambahan anggaran pembangunan pagar dan selasar rumah perlindungan

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 174.000.000,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 229.500.000,00

Alasan perubahan : penambahan anggaran untuk tambah daya listrik DP3AP2KB

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 397.810.977,26  
Setelah perubahan menjadi Rp. 1.081.436.843,17  
Alasan perubahan : Penambahan anggaran kegiatan DWP, Peringatan Hari Ibu dan Rangkaian Kegiatan Hari Ibu
3. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 395.359.154,00  
Setelah perubahan menjadi Rp. 393.741.604,00  
Alasan perubahan : Pergeseran Anggaran Kegiatan
  - b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 311.033.941,00  
Setelah perubahan menjadi Rp. 212.058.021,00  
Alasan perubahan : Pergeseran Anggaran Kegiatan

#### 4. Program Pengendalian Penduduk

##### a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

###### i. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 52.430.000,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 4.430.000,00

Alasan perubahan : Pergeseran anggaran untuk penambahan Peralanan Dinas Kader IMP (PPKBD dan SubPPKBD)

#### 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana

##### a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

###### i. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 49.100.000,00

Setelah perubahan menjadi Rp. 33.100.000,00

Alasan perubahan : Menggunakan fasilitas Milik Pemerintah Daerah (tidak berbayar)

###### ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 259.270.000

Setelah perubahan menjadi Rp. 214.500.000,00

Alasan perubahan : Pergeseran anggaran untuk penambahan Perjalanan Dinas Kader IMP (PPKBD dan SubPPKBD)

###### iii. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 299.436.209,30

Setelah perubahan menjadi Rp. 171.341.209,30

Alasan perubahan : Pergeseran anggaran untuk penambahan Perjalanan Dinas Kader IMP (PPKBD dan SubPPKBD)

- iv. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 241.390.000,00  
Setelah perubahan menjadi Rp. 214.000.000,00  
Alasan perubahan : Pergeseran anggaran untuk penambahan Perjalanan Dinas Kader IMP (PPKBD dan SubPPKBD)
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - i. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 2.229.515.420,00  
Setelah perubahan menjadi Rp. 2.903.015.420,00  
Alasan perubahan : Penambahan anggaran untuk penambahan Perjalanan Dinas Kader IMP (PPKBD dan SubPPKBD)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 50.200.946,92  
Setelah perubahan menjadi Rp. 55.568.355,55  
Alasan perubahan : Penambahan Biaya Distribusi Alokon
  - ii. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas P2KBP3A  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 556.422.247,20  
Setelah perubahan menjadi Rp. 602.566.920,92  
Alasan perubahan : Penambahan Biaya Jasa Medis MOW
  - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 367.312.248,00  
Setelah perubahan menjadi Rp. 446.857.623,00  
Alasan perubahan : Penambahan anggaran Pembelian Alat Kontrasepsi Implant

- iv. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 108.678.828,61  
Setelah perubahan menjadi Rp. 57.678.828,61  
Alasan perubahan : Pengurangan Penambahan anggaran Biaya Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Bidan di Kabupaten Tanah Laut
  
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - i. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 723.504.360,00  
Setelah perubahan menjadi Rp. 298.534.360,00  
Alasan perubahan : Pergeseran anggaran untuk penambahan Perjalanan Dinas Kader IMP (PPKBD dan SubPPKBD)
- 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - i. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 142.614.538,80  
Setelah perubahan menjadi Rp. 123.614.244,27  
Alasan perubahan : Pergeseran
    - ii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 524.355.492,10  
Setelah perubahan menjadi Rp. 330.762.792,10  
Alasan perubahan : Pengurangan Belanja Gendre Kit

- iii. Sub Kegiatan Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 77.527.255,79

Setelah perubahan menjadi Rp. 55.228.949,71

Alasan perubahan : Penambahan Kegiatan Sekolah Lansia

#### **4.3 Pendanaan pada Renja Perubahan Tahun 2025**

Pendanaan daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut melalui Anggaran BOKB, Anggaran Insentif Fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 2025 yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### **4.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan**

Tabel rencana Program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRALAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN RENJALAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJALAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENJALAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH						
																			16	17	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								13.481.687.759,00	13.976.182.001,65	17.954.189.720,40	4.472.501.961,40							18.606.366.817,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.481.687.759,00	13.976.182.001,65	17.954.189.720,40	4.472.501.961,40							18.606.366.817,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.413.814.998,00	1.867.199.554,26	2.133.239.544,33	719.424.546,33							2.290.987.027,00		
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Meningkatnya Pembinaan Perempuan				100 Persen	100 Persen	687.749.921,00	583.575.724,26	1.171.854.532,57	412.250.079,00							1.100.000.000,00		
	2.08.02.2.01	Pelebngaaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang melaksanakn PPRG				100 Persen	100 Persen	109.780.836,00	95.847.689,40	90.417.689,40	-19.363.146,60			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	69.829.616,00	56.959.616,00	53.029.616,00	-16.800.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.08.02.2.01.006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																			

			<i>Jumlah SDM yang diperolehd oleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>			50 Orang	50 Orang	39.951.220,00	38.888.073,40	37.388.073,40	-2.563.146,60	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Pembinaan pada Kelompok Industri Rumahan</i>			47 Kelompok	35 kelompok	577.969.085,00	487.728.034,86	1.081.436.843,17	503.467.758,17				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kabupaten Tanah Laut		580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
		<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>			980 Orang	3364 Orang	577.969.085,00	487.728.034,86	1.081.436.843,17	503.467.758,17		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan</b>		0,005 Rasio	0,005 Rasio	234.490.534,00	245.085.282,00	202.738.787,76	195.774.782,00								430.265.316,00		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peringkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</i>		90 Persen	90 Persen	110.872.664,00	98.727.412,00	60.700.917,76	-50.171.746,24				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		230.265.316,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	6 Dokumen	99.957.238,00	87.811.986,00	53.942.897,76	-46.014.340,24	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	10.915.426,00	10.915.426,00	6.758.020,00	-4.157.406,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PADA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.265.316,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Layanan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100 Persen	100 Persen	123.617.870,00	146.357.870,00	142.037.870,00	18.420.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				16 Orang	16 Orang	123.617.870,00	146.357.870,00	142.037.870,00	18.420.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan				75 Persen	75 Persen	191.890.020,00	175.746.599,00	152.846.599,00	68.831.691,00							260.721.711,00	

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD				3 Kecamatan	3 Kecamatan	191.890.020,00	175.746.599,00	152.846.599,00	-39.043.421,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	260.721.711,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	191.890.020,00	175.746.599,00	152.846.599,00	-39.043.421,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		260.721.711,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanjut			100 Persen	100 Persen	299.684.523,00	862.791.949,00	605.799.625,00	200.315.477,00					500.000.000,00		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	99.921.258,00	550.408.008,00	393.741.604,00	293.820.346,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																	

			<i>Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu</i>				7 Kegiatan	35 Kegiatan	99.921.258,00	550.408.008,00	393.741.604,00	293.820.346,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Persen	100 Persen	199.763.265,00	312.383.941,00	212.058.021,00	12.294.756,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.07.2.02.005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
		<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>				50 Orang	50 Orang	199.763.265,00	312.383.941,00	212.058.021,00	12.294.756,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							12.067.872.761,00	12.108.982.447,39	15.820.950.176,07	3.753.077.415,07							16.315.379.790,00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			85 Nilai	85 Nilai	6.730.717.913,00	6.800.101.271,80	7.335.979.144,67	166.671.359,00							6.897.389.272,00		

2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	9.999.458,00	34.999.458,00	34.999.004,36	24.999.546,36			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.999.702,00	29.999.702,00	29.999.702,00	25.000.000,00		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	4.999.756,00	4.999.756,00	4.999.302,36	-453,64		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.221.578.567,00	5.221.578.567,00	5.442.306.376,98	220.727.809,98				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.667.789.272,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5.216.578.774,00	5.216.578.774,00	5.437.306.584,00	220.727.810,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.660.789.272,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	4.999.793,00	4.999.793,00	4.999.792,98	-0,02	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	73.586.500,00	73.586.500,00	70.402.000,00	-3.184.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	74 Paket	24.586.500,00	24.586.500,00	42.402.000,00	17.815.500,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	4 Orang	49.000.000,00	49.000.000,00	28.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	100 Persen		492.853.504,00	502.236.862,80	530.105.043,89	37.251.539,89			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN, Non ASN, Dinas Peningkatan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		319.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.917.212,00	3.917.212,00	3.917.212,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9 Paket	179.998.661,00	229.284.019,80	257.282.134,24	77.283.473,24	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.270.597,00	9.270.597,00	9.270.597,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	13.260.588,00	13.260.588,00	13.260.587,25	-0,75	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material																			

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	31.409.422,00	31.409.422,00	34.411.490,00	3.002.068,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	210.098.000,00	206.966.000,00	-43.034.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.997.024,00	4.997.024,00	4.997.023,40	-0,60	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	125.661.412,00	125.661.412,00	360.628.247,44	234.966.835,44			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Peningkatan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.01 .2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITU NGAN ANGGAR AN TAHUN SEBELUM NYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>			4 Unit	4 Unit	15.501.416,00	15.501.416,00	15.501.416,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01 .2.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>			1 Unit	1 Unit	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DA NA BA GI HA SIL (DB H)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01 .2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>			1 Unit	2 Unit	83.519.996,00	83.519.996,00	318.486.831,44	234.966.835,44	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DA NA BA GI HA SIL (DB H)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	501.288.472,00	536.288.472,00	591.788.472,00	90.500.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Non ASN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	579.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.000.000,00	174.000.000,00	229.500.000,00	90.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	362.288.472,00	362.288.472,00	362.288.472,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			462.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					100 Persen	100 Persen	305.750.000,00	305.750.000,00	305.750.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		207.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>					1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	15 Unit	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01 2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				51 Unit	51 Unit	21.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01 2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01 2.09.0 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate				2,07 Anak	2,07 Anak	235.166.740,00	219.981.011,25	360.885.043,50	151.223.778,00						386.390.518,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut				4 Sekolah	4 Sekolah	24.981.077,00	19.966.077,00	12.426.283,00	-12.554.794,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	PKB, Guru, Siswa SLTA/SLTP, Lintas Sektor Terkait dan Mitra Kerja Kab. Tanah Laut		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																	
		Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan					4 Kegiatan	4 Kegiatan	24.981.077,00	19.966.077,00	12.426.283,00	-12.554.794,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa				-	26,67 Persen	210.185.663,00	200.014.934,25	348.458.760,50	138.273.097,50		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	PKB, Faskes, Kampung KB, Rumah Data dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) serta para Kader Kab. Tanah Laut		326.390.518,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.009	Binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					11 Laporan	11 Laporan	60.243.348,00	57.962.648,91	4.430.000,00	-55.813.348,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		93.190.518,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					-	10 Laporan	0,00	0,00	109.800.000,00	109.800.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.02 2.02.0 013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	74.943.348,00	72.318.230,34	169.395.000,00	94.451.652,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			123.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02 2.02.0 015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																	
		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				10 Unit	10 Unit	74.998.967,00	69.734.055,00	64.833.760,50	-10.165.206,50	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)			77.20 Persen	77.20 Persen	3.951.570.397,00	4.037.358.586,26	5.379.565.407,00	2.410.029.603,00						6.361.600.000,00		

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)				8,40 Persen	8,40 Persen	474.339.907,00	385.529.888,29	869.429.908,66	395.090.001,66			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	OPD KB, TPPS, Calon Pengantin, PUS, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan/Ibu Menyusui, Anak 0-59 Bulan, Remaja, Mitra Kerja, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan Kab. Tanah Laut	886.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	2 Laporan	99.850.000,00	71.350.000,00	33.100.000,00	-66.750.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PANGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	10 Laporan	0,00	0,00	176.550.000,00	176.550.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				10 Laporan	10 Laporan	99.000.000,00	59.399.672,13	214.500.000,00	115.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PANGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia		314.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	

		<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	219.989.907,00	214.280.216,16	171.341.209,30	-48.648.697,70	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
		<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>				-	1 Dokumen	0,00	0,00	59.938.699,36	59.938.699,36	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
		<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				202 Organisasi	202 Organisasi	55.500.000,00	40.500.000,00	214.000.000,00	158.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan</i>				100 Persen	100 Persen	1.959.760.000,00	2.199.435.000,00	2.903.015.420,00	943.255.420,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kader Poktan, PPKBD, Sub PPKB, Balai Penyuluhan KB Kab. Tanah Laut		2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader/Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			556 Orang	556 Orang	1.959.760.000,00	2.199.435.000,00	2.903.015.420,00	943.255.420,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAA NN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelayanan KB			75,90 Persen	75,90 Persen	1.078.720.490,00	1.013.643.881,99	1.186.745.718,34	108.025.228,34			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.895.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			12 Laporan	12 Laporan	56.051.349,00	65.850.946,92	55.568.355,55	-482.993,45	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAA NN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			850 Orang	1170 Orang	399.999.754,00	377.972.247,20	602.566.920,92	202.567.166,92	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAA NN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.03.006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		

			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			45 Unit	45 Unit	416.599.468,00	367.312.248,00	446.857.623,00	30.258.155,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMN YA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			23 Laporan	23 Laporan	31.578.353,00	28.017.190,26	24.073.990,26	-7.504.962,74	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMN YA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNANN YA BIDANG KESEHATAN NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			170 Orang	44 Orang	174.491.566,00	174.491.249,61	57.678.828,61	-116.812.737,39	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMN YA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>				100 Persen	100 Persen	438.750.000,00	438.749.815,98	420.374.360,00	-18.375.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.080.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>				135 Dokumen	1 Dokumen	438.750.000,00	438.749.815,98	298.534.360,00	-140.215.640,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN DAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN YANG DIPERANGKAP DAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.080.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
		<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				-	20 Kampung	0,00	0,00	121.840.000,00	121.840.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			73.96 Persen	73.96 Persen	1.150.417.711,00	1.051.541.578,08	2.744.520.580,90	1.519.582.289,00							2.670.000.000,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk</i>				256 Kelompok	256 Kelompok	1.150.417.711,00	1.051.541.578,08	982.320.580,90	-168.097.130,10			-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.670.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
		<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>				-	10 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.04 2.01.0 017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	12 Laporan	184.686.798,00	177.086.476,70	123.614.244,27	-61.072.553,73	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 2.01.0 018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				47 Unit	23 Unit	394.355.500,00	394.355.500,00	330.762.792,10	-63.592.707,90	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 2.01.0 019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				220 Orang	209 Orang	118.014.106,00	110.413.865,56	85.228.949,71	-32.785.156,29	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 2.01.0 021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		

			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	203.374.732,00	203.333.341,82	174.544.870,82	-28.829.861,18	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				120 Orang	120 Orang	249.986.575,00	166.352.394,00	162.569.724,00	-87.416.851,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.0 4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	0,00	1.762.200.000,00	1.762.200.000,00			-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGELOMPOKAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.0 4.2.02. 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
	<i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>					-	8 laporan	0,00	0,00	801.000.000,00	801.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGELOMPOKAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.0 4.2.02. 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
	<i>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</i>					-	8 laporan	0,00	0,00	961.200.000,00	961.200.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGELOMPOKAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>J U M L A H</b>								<b>13.481.687.759,00</b>	<b>13.976.182.001,65</b>	<b>17.954.189.720,40</b>	<b>565.381.894.265,27</b>							<b>18.606.366.817,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan dan karyawan DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut dalam memantau dan mengarahkan perkembangan penyusunan dokumen Renja.

**Pelaihari, 17 Juni 2025**

**Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Tanah Laut,**



**Maria Ulfah, S.Psi, M.M  
Pembina Tk. I (IV/b)  
Nip. 197911132005012008**